



PERJANJIAN KINERJA 2025

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

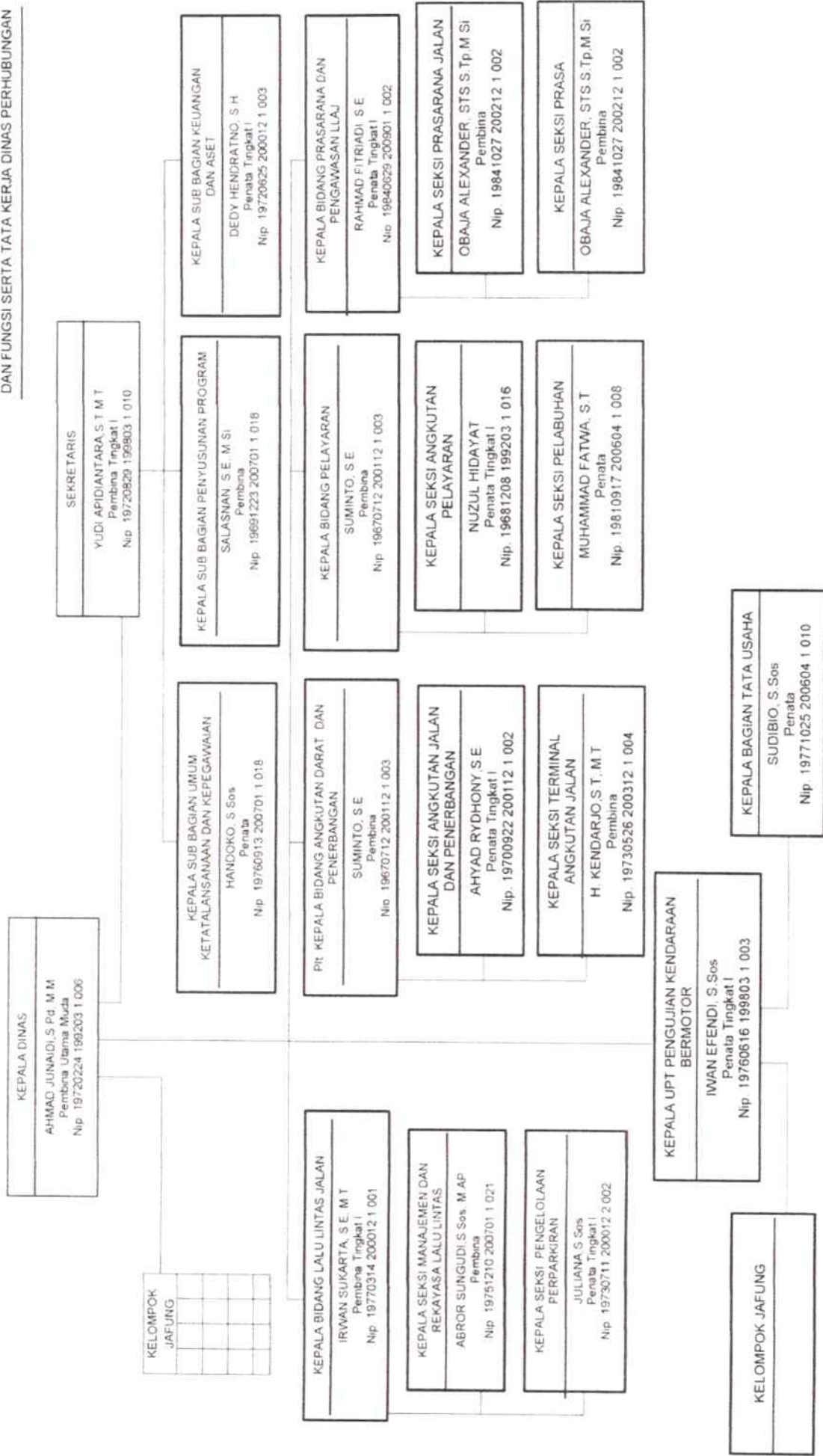


TENGGARONG,
20 JANUARI 2025



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN TIPE A
KABUPATEN KUTAI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 60 TAHUN 2023 TANGGAL 11 OKTOBER 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M.

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;

7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

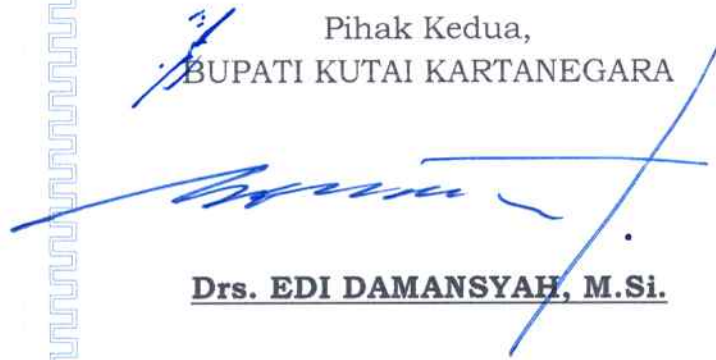
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

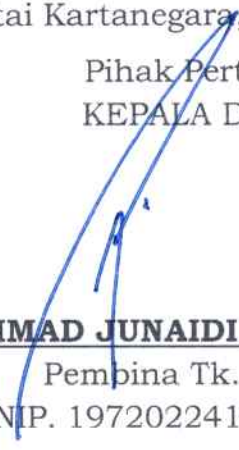
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197202241992031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat (SKM)	Nilai	82
2.	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	Persentase Ketersediaan Prasarana Jalan	Persen	32,24
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,17
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	27
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persen	25
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	84
4.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
5.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
8.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

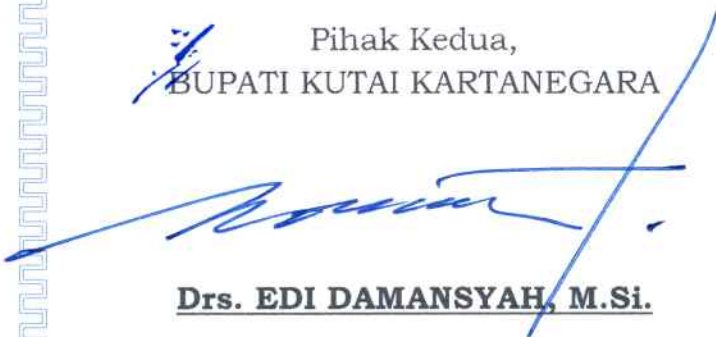
9.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
13.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
14.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
16.	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi	Nilai	3,1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

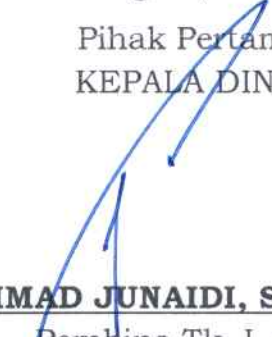
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.43.833.462.554	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.187.974.960.000	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp.7.800.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.239.608.422.554	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197202241992031006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

YUDI APIDANTARA, S.T., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720829 199803 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	84
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerag	Nilai	83,43

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
		© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;	Persen	100
		© Pengamanan BMD;	Persen	100
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;	Persen	100
		© Efektivitas dan efisiensi;	Persen	100
		© Kepemimpinan yang kondusif;	Persen	100
		© Komitmen terhadap kompetensi;	Persen	100
		© Penegakan integritas dan etika.	Persen	100
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
15.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 43.833.463.554,-	
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.950.000.000,-	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	Rp 1.350.000.000,-	APBD
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Rp 100.000.000,-	ABPD
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,-	APBD
4.	Penyelenggaraan wali data pendukung statistik sektoral daerah	Rp 50.000.000,-	APBD
5.	Pelaksanaan pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Rp 250.000.000,-	APBD
6.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 50.000.000,-	APBD
B.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp 735.000.000,-	
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 285.000.000,-	APBD
8.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 50.000.000,-	APBD
9.	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Rp 50.000.000,-	APBD
10.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 200.000.000,-	APBD
11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 150.000.000,-	APBD

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.159.000.000,-	
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 200.000.000,-	APBD
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 300.000.000,-	APBD
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 150.000.000,-	APBD
15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 780.000.000,-	APBD
16.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 100.000.000,-	APBD
17.	Penyediaan Bahan/Material	Rp 100.000.000,-	APBD
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 900.000.000,-	APBD
19.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 300.000.000,-	APBD
20.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 329.000.000,-	APBD
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp 350.000.000,-	
21.	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp 350.000.000,-	APBD
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 20.154.449.215	
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 15.211.021.927,-	APBD
23.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 4.943.427.288,-	APBD
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.310.800.000,-	
24.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 200.000.000,-	APBD

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.310.800.000,-	APBD
26.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 200.000.000,-	APBD
27.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 600.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720829 199803 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANDOKO, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM KETATA LAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720829 199803 1 010

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM KETATA
LAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN



HANDOKO, S.S0s
Penata (III/c)
NIP. 19760913 200701 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	84
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerag	Nilai	83,43

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
15.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 26.709.249.215	
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Rp 735.000.000,-	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 285.000.000,-	APBD
2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 50.000.000,-	APBD
3.	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Rp 50.000.000,-	APBD
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 200.000.000,-	APBD
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 150.000.000,-	APBD
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.159.000.000,-	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp 200.000.000,-	APBD
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 300.000.000,-	APBD
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 150.000.000,-	APBD
9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 780.000.000,-	APBD
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 100.000.000,-	APBD
11.	Penyediaan Bahan/Material	Rp 100.000.000,-	APBD
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 900.000.000,-	APBD
13.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 300.000.000,-	APBD
14.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 329.000.000,-	APBD

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
F.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp 350.000.000,-	
15.	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Rp 350.000.000,-	APBD
G.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 20.154.449.215	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 15.211.021.927,-	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 4.943.427.288,-	APBD
H.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.310.800.000,-	
18.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 200.000.000,-	APBD
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.310.800.000,-	APBD
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 200.000.000,-	APBD
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 600.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720829 199803 1 010

Pihak Pertama,
KASUBBAG UMUM KETATA
LAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN


HANDOKO, S.S0s
Penata (III/c)
NIP. 19760913 200701 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SALASNAN, S.E.,M.Si
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720828 199803 1 010

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM



SALASNAN, S.E.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19691223 200701 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	84
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerag	Nilai	83,43

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
15.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.1.950.000.000,-	
A.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.950.000.000,-	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	Rp 1.350.000.000,-	APBD
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Rp 100.000.000,-	ABPD
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,-	APBD
4.	Penyelenggaraan wali data pendukung statistik sektoral daerah	50.000.000,-	APBD
5.	Pelaksanaan pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Rp 250.000.000,-	APBD
6.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 50.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720829 199803 1 010

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM


SALASNAN, S.E.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19691223 200701 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI HENRATNO, S.H
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS



YUDI APIDIANTARA, S.T., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720829 199803 1 010

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET



DEDI HENDRATNO, S.H
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19720625 200012 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	84
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerag	Nilai	83,43

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
4.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
5.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
6.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
7.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
8.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
9.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
10.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
11.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
12.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
13.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
15.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 15.174.213.339,-	
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14.844.604.390,-	
1.	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Rp 14.294.604.390,-	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 100.000.000,-	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	Rp 350.000.000,-	APBD
4.	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Rp 100.000.000,-	APBD
C.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 329.608.949,-	
5.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 25.000.000,-	APBD
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 154.608.949,-	APBD
7.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp 50.000.000,-	APBD
8.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 100.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


YUDI APIDIANTARA, S.T.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720829 199803 1 010

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET


DEDI HENDRATNO, S.H
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19720625 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770314 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Pelayanan Perhubungan	© Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kegiatan	2
		© Terlaksananya kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1
		© Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	5
3.	Perlengkapan jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	4,17
		© Terlaksananya kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	2
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 87.000.000.000,-	
A.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 3.900.000.000,-	
1.	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Rp 3.100.000.000,-	APBD
2.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Rp 800.000.000,-	APBD
B	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 400.000.000,-	
3.	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Rp 100.000.000,-	APBD
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Rp 300.000.000,-	APBD
C.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.	Rp 82.600.000.000,-	
5.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Rp 4.400.000.000,-	APBD
6.	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.000.000.000,-	APBD
7.	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Rp 49.000.000.000,-	APBD
8.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 700.000.000,-	APBD

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
9.	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Rp 27.500.000.000,-	APBD
D.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,-	APBD
10.	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian Hasil Andalalin	Rp 100.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19770314 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABROR SUNGUDI, S.Sos., M.AP
Jabatan : KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRWAN SUKARTA, S.E., M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
LALU LINTAS JALAN


IRWAN SUKARTA, S.E., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS


ABROR SUNGUDI, S.Sos., M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19751210 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Pelayanan Perhubungan	© Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kegiatan	2
		© Terlaksananya kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1
		© Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	5
3.	Perlengkapan jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	4,17
		© Terlaksananya kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	2
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Mengimformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Mengimformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 34.500.000.000 ,-	
A.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 800.000.000,-	
1.	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Rp 800.000.000,-	ABPD
C.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 33.600.000.000,-	
2.	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Rp 4.400.000.000,-	APBD
3.	Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.000.000.000,-	APBD
4.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 700.000.000,-	APBD
5.	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Rp 27.500.000.000,-	APBD
D.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,-	
6.	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian Hasil Andalalin	Rp 100.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
LALU LINTAS JALAN

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS

IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T
Pembina Tingkat I(IV/b)
NIP. 19770314 200012 1 001

ABROR SUNGUDI, S.Sos.,M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19751210 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIANA, S.Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PARKIR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
LALU LINTAS JALAN


IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T
Pembina Tingkat I(IV/b)
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN PARKIR


JULIANA, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19730711 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Pelayanan Perhubungan	© Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kegiatan	2
		© Terlaksananya kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1
		© Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	5
3.	Perlengkapan jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	4,17
		© Terlaksananya kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	2
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 49.400.000.000,-	
A.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 400.000.000,-	
1.	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Rp 100.000.000,-	APBD
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Rp 300.000.000,-	APBD
C.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 49.000.000.000,-	
3.	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Rp 49.000.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
LALU LINTAS JALAN


IRWAN SUKARTA, S.E., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN PARKIR


JULIANA, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19730711 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFIANSYAH, S.Sos.,M.Si
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRWAN SUKARTA, S.E.,M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

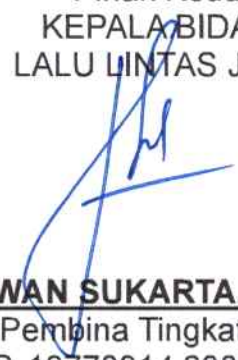
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Tenggarong, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
LALU LINTAS JALAN


IRWAN SUKARTA, S.E., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770314 200012 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS KEBIJAKAN
AHLI MUDA


ALFIANSYAH, S.Sos., M.Si
Pembina I (IV/a)
NIP. 19750608 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Pelayanan Perhubungan	© Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kegiatan	2
		© Terlaksananya kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1
		© Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	5
3.	Perlengkapan jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	4,17
		© Terlaksananya kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan	2
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menginformasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 3.100.000.000,-	
A.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 3.100.000.000,-	
1.	Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten / Kota	Rp 3.100.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
LALU LINTAS JALAN


IRWAN SUKARTA, S.E., M.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770314 200012 1 001

Tenggarong, 20 Januari 2025

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN
AHLI MUDA


ALFIANSYAH, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19750608 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMINTO, S.E
Jabatan : PIt. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DARAT DAN
PENERBANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG
ANGKUTAN DARAT DAN PENERBANGAN

SUMINTO, S.E
Pembina (IV/a)
NIP. 19670712 200112 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Peningkatan Kapasitas sarana, prasarana serta fasilitas Perhubungan	Persentase pengelolaan terminal penumpang tipe C	Persen	100
		© Persentase penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Persen	100
		© Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota.	Persen	100
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Mengimformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Mengimformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menginformasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
4.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
5.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
8.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
9.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
13.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
14.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
16.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 3.710.000.000,-	
A.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 1.160.000.000,-	
1.	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp 1.160.000.000,-	APBD
B.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.300.000.000,-	
2.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 1.200.000.000,-	APBD
3.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.100.000.000,-	APBD
C.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 250.000.000,-	
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 250.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BIDANG ANGKUTAN
DARAT DAN PENERBANGAN

SUMINTO, S.E
Pembina (IV/a)
NIP.19670712 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHYAD RYDHONY. S.E

Jabatan : KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN PENERBANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMINTO, S.E

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DARAT DAN
PENERBANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
ANGKUTAN DARAT DAN
PENERBANGAN


SUMINTO. S.E

Pembina (IV/a)

NIP.19670712 200112 1 003

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN
DAN PENERBANGAN


AHYAD RYDHONY. S.E

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19700922 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Peningkatan Kapasitas sarana, prasarana serta fasilitas Perhubungan	Persentase pengelolaan terminal penumpang tipe C	Persen	100
		© Persentase penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Persen	100
		© Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota.	Persen	100
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Mengimformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
4.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
5.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
7.	Maturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Sistem Intern Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
8.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
9.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
13.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
14.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
16.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 2.550.000.000,-	
A.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.550.000.000,-	
1.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 1.200.000.000,-	APBD
2.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.100.000.000,-	APBD
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 250.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
Pit. KEPALA BIDANG
ANGKUTAN DARAT DAN PENERBANGAN

SUMINTO, S.E

Pembina (IV/a)

NIP.19670712 200112 1 003

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN
DAN PENERBANGAN

AHYAD RYDHONY. S.E

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19700922 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. KENDARJO, S.T.,M.Si
Jabatan : KEPALA SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMINTO, S.E
Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DARAT DAN
PENERBANGAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
ANGKUTAN DARAT DAN
PENERBANGAN


SUMINTO, S.E
Pembina (IV/a)

NIP.19670712 200112 1 003

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TERMINAL
ANGKUTAN JALAN


H.KENDARJO, S.T., M.T
Pembina (IV/a)

NIP.19730526 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Peningkatan Kapasitas sarana, prasarana serta fasilitas Perhubungan	Persentase pengelolaan terminal penumpang tipe C	Persen	100
		© Persentase penyediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.	Persen	100
		© Persentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota.	Persen	100
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
4.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
5.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
7.	Maturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Sistem Intern Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
8.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
9.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
13.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
14.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25
16.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 1.160.000.000,-	
A.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 1.160.000.000,-	
1.	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp 1.160.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA BIDANG
ANGKUTAN DARAT DAN PENERBANGAN


SUMINTO, S.E

Pembina (IV/a)

NIP.19670712 200112 1 003

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
TERMINAL ANGKUTAN JALAN


H. KENDARJO, S.T., M.T

Pembina (IV/a)

NIP.19730526 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMINTO, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYARAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,
KEPALA
BIDANG PELAYARAN

SUMINTO, S.E
Pembina (IV/a)
NIP.19670712 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Pelabuhan pengupan lokal	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Persen	27
3.	Pelabuhan Sungai Danau	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persen	25
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 7.800.000.000,-	
A.	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 150.000.000,-	
1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 150.000.000,-	APBD
B	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 200.000.000,-	
2.	Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Rp 200.000.000,-	APBD
C	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 7.250.000.000,-	
3.	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Rp 300.000.000,-	APBD
4.	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Rp 5.250.000.000	APBD
5.	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Rp 1.700.000.000,-	APBD
D.	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 1.000.000.000,-	
6.			

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
6.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Rp 200.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELAYARAN

SUMINTO, S.E
Pembina (IV/a)
NIP.19670712 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUZUL HIDAYAT
Jabatan : KEPALA SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMINTO, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYARAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

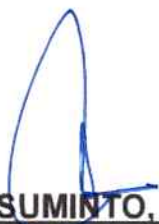
Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PELAYARAN



SUMINTO, S.E
Pembina (IV/a)

NIP.19670712 200112 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI
ANGKUTAN PELAYARAN



NUZUL HIDAYAT
Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19681208 199203 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Pelabuhan pengupan lokal	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	27
3.	Pelabuhan Sungai Danau	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persen	25
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 2.200.000.000,-	
A	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 2.000.000.000,-	
1.	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Rp 300.000.000,-	APBD
2.	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Rp 1.700.000.000,-	APBD
B.	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 200.000.000,-	
3.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal	Rp 200.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PELAYARAN


SUMINTO, S.E

Pembina (IV/a)

NIP.19670712 200112 1 003

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI
ANGKUTAN PELAYARAN**


NUZUL HIDAYAT

Penata Tingkat I/(III/d)

NIP.19681208 199203 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD FATWA, S.T
Jabatan : KEPALA SEKSI PELABUHAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMINTO, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYARAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

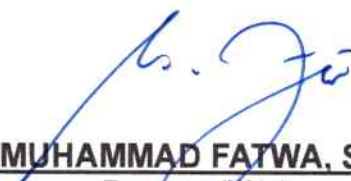
Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PELAYARAN



SUMINTO, S.E
Pembina (IV/a)
NIP.19670712 200112 1 003

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PELABUHAN



MUHAMMAD FATWA, S.T
Penata (III/c)
NIP.19810917 200604 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kinerja Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Pelabuhan pengupan lokal	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persen	27
3.	Pelabuhan Sungai Danau	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan	Persen	25
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 5.550.000.000,-	
A.	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 150.000.000,-	
1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 150.000.000,-	APBD
B	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian pelabuhan Pengumpan Lokal	Rp 200.000.000,-	
2.	Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Rp 200.000.000,-	APBD
C	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 5.200.000.000,-	
3.	Pembangunan dermaga Sungai dan Danau	Rp 5.200.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PELAYARAN

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PELABUHAN

SUMINTO, S.E

Pembina (IV/a)

NIP.19670712 200112 1 003

MUHAMMAD FATWA, S.T

Penata (III/c)

NIP.19810917 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD FITRIADI, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PENGAWASAN LLAJ

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
PENGAWASAN LLAJ

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006


RAHMAD FITRIADI, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840629 200901 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Prasarana Jalan	Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
3.	Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	4,17
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Mengimformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Mengimformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Mengimformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khusus;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 95.356.960.000,-	
A.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 93.334.960.000,-	
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 92.256.960.000,-	APBD
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 1.078.000.000,-	APBD
B.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 2.100.000.000,-	
3.	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Rp 2.000.000.000,-	ABPD
4.	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Rp 100.000.000,-	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
PENGAWASAN LLAJ

RAHMAD FITRIADI, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840629 200901 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OBAJA ALEXANDER ST SINAGA, S.STP.,M.Si
Jabatan : KEPALA SEKSI PRASARANA JALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RAHMAD FITRIADI, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PENGAWASAN LLAJ

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

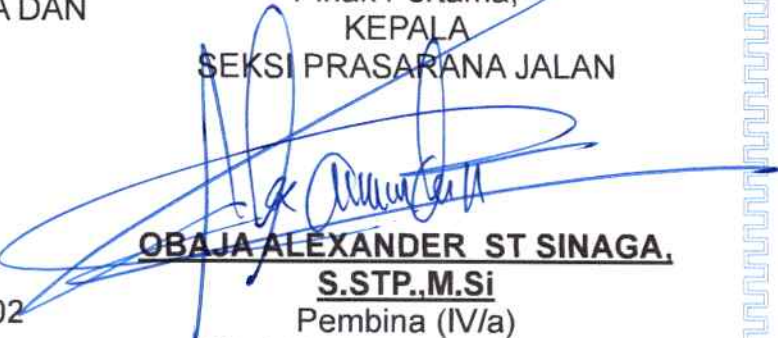
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
PENGAWASAN LLAJ

Pihak Pertama,
KEPALA
SEKSI PRASARANA JALAN


RAHMAD FITRIADI, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840629 200901 1 002


OBAJA ALEXANDER ST SINAGA,
S.STP..M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19841027 200212 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Prasarana Jalan	Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
3.	Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	4,17
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Sistem Intern Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 93.334.960.000,-	
A.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 93.334.960.000,-	
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 92.256.960.000,-	APBD
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 1.078.000.000	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA
BIDANG PRASARANA DAN
PENGAWASAN LLAJ


RAHMAD FITRIADI, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840629 200901 1 002

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA
SEKSI PRASARANA JALAN


OBAJA ALEXANDER ST SINAGA,
S.STP.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19841027 200212 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU SETIAWAN, S.E
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN LLAJ

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RAHMAD FITRIADI, S.E
Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PENGAWASAN LLAJ

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG
PRASARANA DAN PENGAWASAN
LLAJ



RAHMAD FITRIADI, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840629 200901 1 002

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA
SEKSI PENGAWASAN LLAJ



HERU SETIAWAN, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19770530 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
		Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Persen	4,18
2.	Prasarana Jalan	Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
3.	Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Persen	4,17
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	83
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai	83,43
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
5.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
	Langkah penyampaian FKP	© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
6.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
7.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;		

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;		
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK valid dan akurat.		
8.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;		
		© Pengamanan BMD;		
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;		
		© Efektivitas dan efisiensi;		
		© Kepemimpinan yang kondusif;		
		© Komitmen terhadap kompetensi;		
		© Penegakan integritas dan etika.		
9.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khusus;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
10.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100
11.	Meningkatnya Penyelenggaraan Data Indonesia Satu	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
12.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
13.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
14.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100
15.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
16.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase ketersediaan prasarana jalan	Persen	32,24
		© Persentase ketersediaan perlengkapan jalan;	Persen	4,17
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan lokal;	Persen	27
		© Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.	Persen	25

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
17.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Subsidi atau dukungan Fiskal;	Nilai	
		© Kebijakan transportasi yang efisien	Persen	100
		© Pengaturan tarif transportasi;	Nilai	
		© Pengembangan Infrastruktur Transportasi	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 2.100.000.000,-	
B.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 2.100.000.000,-	
1.	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Rp 2.000.000.000,-	ABPD
2.	Peningkatan kapasitas Auditor dan Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 100.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PRASARANA DAN
PENGAWASAN LLAJ**



RAHMAD FITRIADI, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840629 200901 1 002

Pihak Pertama,
**KEPALA
SEKSI PENGAWASAN LLAJ**



HERU SETIAWAN, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19770530 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IWAN EFENDI, S.Sos
Jabatan : KEPALA UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,
KEPALA UPT.
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

IWAN EFENDI, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760616 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	© Persentase Ketersediaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	80
		© Persentase Ketersediaan Peralatan Uji	Persen	80
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	84
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerag	Nilai	83,43

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
4.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
		© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
5.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;	Persen	100
		© Pengamanan BMD;	Persen	100
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;	Persen	100
		© Efektivitas dan efisiensi;	Persen	100
		© Kepemimpinan yang kondusif;	Persen	100
		© Komitmen terhadap kompetensi;	Persen	100
		© Penegakan integritas dan etika.	Persen	100
8.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
9.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan Dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
13.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana Dan prasarana kantor Dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
14.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase Ketersediaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	80
		© Persentase Ketersediaan Peralatan Uji	Persen	80
16.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Gratis / Tidak dipungut bayaran.	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 1.830.000.000,-	
A.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 1.830.000.000,-	
1.	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 1.000.000.000,-	APBD
2.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 100.000.000,-	APBD
3.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 200.000.000,-	APBD
4.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 100.000.000,-	APBD
5.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 330.000.000,-	APBD
6.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 100.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

AHMAD JUNAIDI, S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720224 199203 1 006

Pihak Pertama,
KEPALA UPT.
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

IWAN EFENDI, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.19760616 199803 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUDIBYO, A.Md

Jabatan : KASUBAG TU UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IWAN EFENDI, S.Sos

Jabatan : KEPALA UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTO

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin;
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi;
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data;
9. Terwujudnya ASN yang religius, "BerAKHLAK" mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN;
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Terwujudnya stabilitas harga dan ketersediaan barang serta jasa strategis melalui pengendalian inflasi yang efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
12. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
13. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator

14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPT. PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR



IWAN EFENDI, S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19760616 199803 1 003

Pihak Pertama,
KASUBAG TU UPT.
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



SUDIBYO, A.Md

Penata (III/c)

NIP.19771026 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas kinerja Pelayanan Perhubungan	Nilai Survei Kepuasan Pelanggan / Masyarakat (SKM)	Nilai	82
	Tahapan Survei :	© Menentukan target Survei;	Sampel	50
		© Menyusun Instrumen Survei;	Kegiatan	1
		© Menentukan Teknik penarikan Sampel;	Kegiatan	1
		© Menentukan Responden;	Responden	100
		© Mengelola hasil Survei;	Kegiatan	1
		© Menyiapkan dan melaporkan hasil.	Kegiatan	1
2.	Meningkatnya Kapasitas Sarana, Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	© Persentase Ketersediaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	80
		© Persentase Ketersediaan Peralatan Uji	Persen	80
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas kinerja Aparatur	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	84
		© Menginformasikan hasil capaian kinerja secara priodik;	Kgiatan	1
		© Menginformasikan hasil evaluasi kinerja;	Kegiatan	1
		© Menginformasikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan;	Dokumen	1
		© Menngimforasikan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.	Dokumen	1
		© Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100 % paling lambat akhir bulan Februari setiap tahunnya	Persen	100
		© Nilai tata kelola Arsip Perangkat Daerag	Nilai	83,43

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		© Kawasan tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau.	Persen	100
4.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
		© Menyampaikan, kritik, saran dan masukan kepada penyelenggara layanan;	Kegiatan	1
		© Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.	Kegiatan	1
5.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survei Kukar)	Persen	100
		© Prosedur pelayanan mudah;	Persen	100
		© Persyaratan pelayanan jelas;	Persen	100
		© Disiplin petugas;	Persen	100
		© Tanggung jawab;	Persen	100
		© Kemampuan petugas;	Persen	100
		© Kesopanan dan keramahan petugas.	Persen	100
6.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat menyanggah temuan BPK atas audit LKPD;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memberikan data yang valid untuk menyanggah temuan BPK;	Persen	100
		© Entitas yang diperiksa dapat memastikan data yang disampaikan dalam laporan hasil	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
7.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada daerah	Level	3
		© Keandalan pelaporan Keuangan;	Persen	100
		© Pengamanan BMD;	Persen	100
		© Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;	Persen	100
		© Efektivitas dan efisiensi;	Persen	100
		© Kepemimpinan yang kondusif;	Persen	100
		© Komitmen terhadap kompetensi;	Persen	100
		© Penegakan integritas dan etika.	Persen	100
8.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
		© Baru;	Ide	1
		© Terencana;	Konsep	1
		© Khas;	Tersendiri	1
		© Mempunyai tujuan yang jelas;	Arah	1
		© Memiliki perencanaan yang jelas dan terukur;	Bagan	1
		© Punya Keunggulan	Melebihi	1
9.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
		© Laporan relevan Dengan kinerja Pemerintah;	Persen	100
		© Menggunakan bahasa yang baik dan benar;	Persen	100
		© Bukan merupakan ujaran kebencian SARA dan caci maki;	Persen	100
		© Bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan.	Persen	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
10.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterimputan Data pada Satu Data Indonesia.	Persen	100
		© Data perlengkapan jalan;	Data	1
		© Data Terminal;	Data	1
		© Data Pelabuhan;	Data	1
		© Data Lintas Penyeberangan	Data	1
		© Data Kir Kendaraan bermotor.	Data	1
11.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
		© Mengaji Al-Qur'an	Kegiatan	1
		© Zakat mal	Nisab	1
12.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
		© Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota. (IKK.1)	Rasio	0,48
		© Konektivitas antar Wilayah (IKK.2)	Persen	100
13.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
		© Persentase pengelolaan barang milik daerah dalam keadaan baik;	Persent	100
		© Persentase sarana Dan prasarana kantor Dalam kondisi baik;	Persent	100
		© Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;	Persent	100
		© Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;	Hukuman	0
		© Adanya output dan outcome yang terukur	Persent	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
14.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
		© Manajemen perubahan;	SDM	Smart
		© Penguatan kelembagaan;	SDM	Smart
		© Penguatan tata laksana;	SDM	Smart
		© Penguatan peraturan perundang-undangan;	SDM	Smart
		© Penguatan system manajemen SDM aparatur;	SDM	Smart
		© Penguatan system pengawasan;	SDM	Smart
		© penguatan akuntabilitas kerja.	SDM	Smart
15.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
		© Persentase Ketersediaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen	80
		© Persentase Ketersediaan Peralatan Uji	Persen	80
16.	Pengendalian Inflasi	Angka Inflasi	Nilai	3,1
		© Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Gratis / Tidak dipungut bayaran.	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 1.530.000.000,-	
A.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 1.530.000.000,-	
1.	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 1.000.000.000,-	APBD
2.	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 200.000.000,-	APBD
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 330.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPT. PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pihak Pertama,
KASUBAG TU UPT.
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR


IWAN EFENDI, S.Sos

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.19760616 199803 1 003


SUDIBYO, A.Md

Penata (III/c)

NIP.19771026 200604 1 010